



Edisi 1 Februari 2026

PRODUK HUKUM POSITIF TERKINI

Laporan Riset Dr Jan Hoesada, KSAP

PENDAHULUAN

Riset maya dilakukan pada bulan Oktober 2025 sehingga tak mewakili 100 % periode 2025. Tak gading nan tak-retak, hadirin sidang pembaca yang kami muliakan seperti biasa di mohon mewaspadai kedangkalan makalah dan mencari sumber lain yang lebih afdol.

Tujuan utama makalah seperi biasa adalah untuk penyamaan wawasan KSAP agar selalu dekat situasi-terkini NKRI cq keputusan Kabinet dalam tugas menyusun SAP, makalah dapat digunakan oleh para periset, pengajar dan siswa berbagai jenis fakultas atau jurusan, terutama Jurusan Akuntansi.

MISI/TUPOKSI, KINERJA DAN PRODUK HUKUM POSITIF KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

1. Kemendagri

Produk hukum Kemendagri tahun 2025 antara-lain mencakupi beberapa peraturan menteri seperti

- Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan daerah,
- Permendagri Nomor 3 Tahun 2025 tentang pembentukan produk hukum di Kemendagri,
- Permendagri Nomor 6 Tahun 2025 terkait DAK nonfisik tunjangan guru, serta Permendagri Nomor 9 Tahun 2025 tentang perencanaan anggaran.
- Selain itu, Kemendagri juga menghelat Rapat Koordinasi Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) 2025 untuk menyinkronkan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan kualitas produk hukum daerah.

Fokus kemendagri, pemerintahan provinsi dan pemda pada tahun 2025 adalah

- peningkatan efisiensi anggaran transfer dan APBD,
- pemangkasan dana transfer dari pusat, serta
- fokus pada swasembada pangan dan pembangunan berkelanjutan.
- Pemda juga didorong untuk meningkatkan
 - kualitas layanan publik,

- memanfaatkan teknologi, serta mendukung program pemerintah pusat seperti magang nasional dan
- pengelolaan sampah melalui fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL).

Anggaran transfer daerah dipangkas oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, yang berpotensi memengaruhi gaji PPPK dan belanja pembangunan daerah. Sejak awal 2025, pemerintah menerapkan efisiensi anggaran yang juga berdampak pada APBD. Pemda diminta untuk memetakan kekuatan keuangan daerah untuk mengatasi pemotongan dana ini.

- Walau mendapat tekanan Kemendagri, ternyata realisasi belanja daerah hingga September 2025 dilaporkan melambat, yang dapat meningkatkan risiko ekonomi di tingkat daerah.
- Menteri Dalam Negeri menginstruksikan Pemda untuk bergerak cepat mewujudkan swasembada pangan guna menghadapi musim kemarau 2025 dan menjaga stabilitas harga serta inflasi.
- Seluruh Pemda diundang untuk berpartisipasi dalam program magang nasional angkatan kedua yang akan dimulai November 2025, yang bertujuan memberikan wawasan dunia kerja kepada lulusan perguruan tinggi.
- Pemda, seperti di DKI Jakarta, sebagai pemda percontohan, memprioritaskan peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan publik, serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong inovasi dan kreativitas.
- Sebagai instruksi nasional, Pemda diminta menyiapkan lahan dan infrastruktur untuk mendukung program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) yang bertujuan mengelola sampah kota secara lebih efisien.
- Pemda diminta meningkatkan kemampuan mandiri, mencari sumber pendapatan lain untuk menutup pemotongan dana transfer dari pusat.
- Kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan dana transfer dari pusat mengharuskan Pemda untuk lebih adaptif dan proaktif dalam mengelola keuangan dan pembangunan daerahnya. Meskipun ada tantangan anggaran, Pemda didorong untuk tetap menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas layanan publik di tengah kondisi ini.

Contoh produk hukum utama Kemendagri tahun 2025:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025: Mengenai perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2025: Mengatur tentang pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2025: Tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk tunjangan guru ASN di daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025: Berfokus pada perencanaan anggaran, termasuk koordinasi penyusunan anggaran kementerian dan pinjaman/hibah luar negeri.

Kesulitan dan hambatan terbesar Kemendagri terletak pada

- pelayanan publik seluruh pemda, seperti data kependudukan yang tidak akurat karena perpindahan penduduk,
- kurangnya sarana dan prasarana serta SDM yang memadai untuk administrasi kependudukan, dan
- kendala dalam program digitalisasi pemerintahan seperti tumpang tindih regulasi dan infrastruktur yang terbatas.
- Hambatan lain mencakup tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan pelaksanaan kerja sama antar-daerah yang seringkali terhenti pada tahap kesepakatan awal, sehingga perlu pendampingan dari kementerian.

2. Kementerian Luar Negeri

Produk hukum Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tahun 2025 antara lain meliputi

- Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) tentang Pembentukan Produk Hukum (Permenlu No. 1 Tahun 2025),
- Pemberian Tunjangan Kinerja (Permenlu No. 3 Tahun 2025),
- Perubahan Kebijakan Hibah (Permenlu No. 2 Tahun 2025), dan
- Organisasi dan Tata Kerja (Permenlu No. 4 Tahun 2025).
- Selain itu, terdapat juga berbagai Keputusan Menteri (Kepmen) dan Nota Kesepakatan yang dikeluarkan Kemlu pada tahun tersebut.

Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) 2025:

- Permenlu Nomor 1 Tahun 2025: Mengatur tata cara pembentukan produk hukum di lingkungan Kemlu, mencakup Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya.
- Permenlu Nomor 2 Tahun 2025: Perubahan kedua atas Permenlu Nomor 11 Tahun 2019 tentang kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing atau lembaga asing.
- Permenlu Nomor 3 Tahun 2025: Mengatur pemberian tunjangan kinerja, hari kerja, dan jam kerja bagi pegawai di lingkungan Kemlu.
- Permenlu Nomor 4 Tahun 2025: Menetapkan organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri.
- Permenlu Nomor 5 Tahun 2025: Mencabut Permenlu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Diplomat.

3. Kementerian Pertahanan

Produk hukum Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2025 antara-lain meliputi

- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pertahanan.

- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2025 yang membahas pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sebagai lembaga non-struktural untuk memberikan masukan kepada Presiden di bidang pertahanan. Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pertahanan.
- Berbagai Permenhan yang mengatur kriteria penerapan praktik terbaik pelaksanaan Program Kegiatan Bela Negara (PKBN) dan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

4. Kementerian Sekretariat Negara.

Produk hukum Kementerian Sekretariat Negara tahun 2025 yang tercatat pada tanggal 8 Oktober 2025 antara lain adalah

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah dalam Jaringan Tahun 2025-2029.
- Contoh Produk Hukum Lain yang Diterbitkan pada 2025:
 - Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025.
 - Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah dalam Jaringan Tahun 2025-2029 (seperti yang disebutkan di atas).

5. Kementerian Agama

Produk hukum Kementerian Agama (Kemenag) 2025 mencakup beragam jenis peraturan, termasuk Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Keputusan Menteri Agama (KMA) seperti

- PMA No. 11/2025 tentang penyuluh agama, KMA 714/2025 terkait jaminan produk halal, dan
- KMA 478/2025 tentang pengelolaan PNPB layanan nikah, serta Surat Edaran (SE) untuk panduan ibadah dan seleksi.

Beberapa contoh produk hukum Kemenag 2025:

Peraturan Menteri Agama (PMA)

- PMA No. 11 Tahun 2025: Pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional penyuluh agama.
- PMA No. 5 Tahun 2025: Mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam PMA No. 39 Tahun 2021 tentang pengembangan perguruan tinggi Islam.
- PMA No. 7 Tahun 2025: Perubahan atas PMA No. 9 Tahun 2020 tentang tata cara pengeluaran keuangan haji.
- PMA No. 9 Tahun 2025: Mengubah PMA No. 21 Tahun 2013.
- PMA yang akan datang: Kemenag akan menerbitkan PMA sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pengelolaan Zakat.

Keputusan Menteri Agama (KMA)

- KMA 714/2025: Memperkuat layanan jaminan produk halal.
- KMA 478/2025: Pedoman pengelolaan PNPB atas layanan nikah atau rujuk.
- SK Nomor 519 Tahun 2025: Pedoman implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK).

6. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Produk hukum utama yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 meliputi :

- Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru untuk mendorong profesionalisme guru,
- Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi untuk memastikan materi pembelajaran relevan dan berkualitas, serta
- Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kurikulum yang mengatur penyesuaian struktur pembelajaran, termasuk penambahan mata pelajaran seperti koding dan AI.

7. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Produk hukum utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tahun 2025 antara-lain meliputi

- Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 untuk memperkuat sistem mutu perguruan tinggi agar lebih adaptif dan berstandar internasional.
- Permendiktisaintek Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan
- Permendiktisaintek Nomor 23 Tahun 2025 yang mengatur tunjangan kinerja pegawai.

8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Produk hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2025 mencakup beberapa peraturan menteri (Permen) yang mengatur hal-hal penting, seperti

- Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2025 tentang penyusunan basis data informasi geospasial tematik pertanahan,
- Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2025 tentang standar pelayanan penataan ruang,
- Permen ATR/BPN No. 4 Tahun 2025 tentang pembentukan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Utara, dan
- Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2025 mengenai pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah.

Contoh-contoh Produk Hukum Kementerian ATR/BPN Tahun 2025

- Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2025: Mengatur pedoman penyusunan basis data informasi geospasial tematik pertanahan yang terstandar.
- Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2025: Menetapkan standar pelayanan penataan ruang di lingkungan kementerian.
- Permen ATR/BPN No. 4 Tahun 2025: Membentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Utara.
- Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2025: Mengatur pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah, serta memberikan rekomendasi penetapan hak atas tanah kembali.

- Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2025: Merupakan perubahan atas peraturan menteri sebelumnya mengenai pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah.

9. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Produk hukum Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) tahun 2025 mencakup antara-lain peraturan seperti

- Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa dan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai.
- Terdapat pula peraturan terkait Ketahanan Pangan Desa (Kepmendesa Nomor 3 Tahun 2025)
- Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2025)
- Koperasi Desa Merah Putih (Permendesa PDT Nomor 10 Tahun 2025).

Berikut adalah beberapa produk hukum Kemendes PDTT tahun 2025:

- Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2025: Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025: Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
- Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025: Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan.
- Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2025: Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai.
- Permendesa PDT Nomor 10 Tahun 2025: Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

10. Kementerian Transmigrasi.

Produk hukum Kementerian Transmigrasi tahun 2025 yang utama adalah

- Peraturan Menteri (Permen) yang mencakup penugasan tugas pembantuan bidang transmigrasi (Permen 2/2025),
- ketentuan penanaman modal dan izinnya di kawasan transmigrasi (Permen 3/2025),
- organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (Permen 4/2025), serta
- Transformasi Transmigrasi (Permen 8/2025)

Berikut adalah produk hukum 2025:

- Permen Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2025: Mengenai kerja sama.
- Permen Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025: Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025, bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan sebagian urusan pemerintah di bidang transmigrasi melalui penugasan kepada pemerintah daerah.

- Permen Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025: Mengatur bentuk pelaksanaan penanaman modal dan tata cara pemberian izin penanaman modal di kawasan transmigrasi, serta pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan.
- Permen Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2025: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Transmigrasi.
- Permen Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2025: Berupa perubahan atas Permen Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025.
- Permen Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025: Mengenai Transformasi Transmigrasi, yang bertujuan untuk mengubah pola dan sistem pelaksanaan program transmigrasi.

11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Produk hukum utama Kementerian ESDM tahun 2025 mencakupi

- Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2025 tentang pedoman perjanjian jual beli listrik energi terbarukan dan
- Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2025 tentang kerja sama pengelolaan wilayah kerja migas untuk peningkatan produksi.
- Selain itu, terdapat juga Keputusan Menteri ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan
- Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2025 tentang tata niaga bahan bakar nabati.

Rincian sbb:



- Permen ESDM No. 5 Tahun 2025: Mengatur pedoman perjanjian jual beli listrik dari pembangkit listrik energi terbarukan (EBT) untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong investasi serta mempercepat transisi energi ke EBT.
- Permen ESDM No. 14 Tahun 2025: Mengatur tentang kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja migas untuk meningkatkan produksi minyak dan gas, serta memberikan izin usaha kepada UMKM terkait sumur masyarakat.
- Keputusan Menteri ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025: Menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), yang merupakan pedoman pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia.
- Permen ESDM No. 4 Tahun 2025: Mencabut peraturan lama terkait penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (biofuel), menggantinya dengan peraturan baru.

12. Kementerian Hukum dan HAM.

Produk hukum Kementerian Hukum tahun 2025 meliputi Peraturan Menteri (Permenkum) tentang berbagai hal seperti

- penerjemah tersumpah (Permenkum 4/2025),

- manajemen risiko (Permenkum 15/2025), dan
- tata naskah dinas (Permenkum 3/2025), serta
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),
- Undang-Undang (UU), dan
- Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang dalam pembahasan atau proses pengesahan di Prolegnas 2025.
- Selain itu, juga terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) seperti RUU Perampasan Aset yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Berikut adalah beberapa contoh produk hukum Kementerian Hukum tahun 2025:

- Peraturan Menteri (Permenkum):
 - Permenkum No. 3 Tahun 2025: Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum.
 - Permenkum No. 4 Tahun 2025: Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah.
 - Permenkum No. 15 Tahun 2025: Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum.
 - Permenkum No. 28 Tahun 2025: Sebuah peraturan menteri yang diterbitkan pada tahun ini.
 - Permenkum No. 10 Tahun 2025: Mengatur Logo dan Mars Kementerian Hukum.
 - Permenkum No. 11 Tahun 2025: Peraturan lain yang diterbitkan pada tahun 2025.
- Undang-Undang (UU) dan Rancangan Undang-Undang (RUU):
 - RUU Penyitaan Aset penduduk oleh negara, sedang diteliti , terkait deklarasi HAM , kepastian hukum cq UUD cq perlindungan hak milik sah warga negara dan dampak kontra-produktif bagi gairah berinvestasi dan dampak negatif kepada pertumbuhan perekonomian bangsa.
- Produk Hukum Lain:
 - Super PS Kementerian Hukum: Sistem digitalisasi perizinan yang direncanakan diluncurkan akhir tahun 2025 atau awal 2026.
 - Perjanjian Kinerja (PK) 2025: Dokumen perencanaan kinerja internal seperti PK Karo BMN, PK Biro Hukum Komunikasi Publik dan Kerjasama, serta PK Biro Keuangan.

13. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Produk hukum Kementerian Imigrasi 2025 meliputi

- Peraturan Menteri (Permen) tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas Diaspora,
- Permen tentang Rencana Strategis,
- Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan Kerja Sama, serta
- Keputusan Menteri (Kepmen) tentang Tata Kelola Pengawasan Intern, Pejabat Pengelola Informasi, dan Klasifikasi Visa.
- Selain itu, ada juga Permen terkait Pencabutan Peraturan Menteri sebelumnya.

Berikut adalah beberapa contoh produk hukum dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang diterbitkan pada tahun 2025:

- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 3 Tahun 2025: Tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora.
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025: Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 8 Tahun 2025: Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- Keputusan Menteri M.IP-27.OT.01.01 Tahun 2025: Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- Keputusan Menteri M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025: Tentang Klasifikasi Visa.
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 5 Tahun 2025: Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021

14. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Produk hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025 mencakup peraturan menteri yang baru seperti

- Permen KKP Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja dan
- Permen KKP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.
- Selain itu, KKP juga telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik.



Contoh Produk Hukum KKP Tahun 2025:

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 16 Tahun 2025: Mengatur Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan.
 - Permen KKP Nomor 15 Tahun 2025: Mengatur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.
 - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KKP) Nomor 20 Tahun 2025: Menetapkan Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan KKP.
 - Permen KKP Nomor 3 Tahun 2025: Mengubah sebagian Permen KKP Nomor 33 Tahun 2023 yang mengatur Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Permen KKP 2025 mencabut beberapa peraturan sebelumnya, seperti

- Permen KP Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan yang dicabut oleh Permen KP Nomor 7 Tahun 2025. Selain itu, Permen KP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan dicabut oleh Permen KP Nomor 8 Tahun 2025.

- Permen KKP Nomor 2 Tahun 2025 mencabut Permen KKP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pencabutan ini berlaku sejak 11 Februari 2025 dan menyatakan Peraturan Menteri sebelumnya tidak berlaku lagi.

15. Kementerian Kesehatan.

Produk hukum Kementerian Kesehatan tahun 2025 meliputi

- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi,
- Permenkes Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 13 Tahun 2024,
- Permenkes Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Kapal,
- Permenkes Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Klinis.
- Selain itu, terdapat juga Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk dapur program makan bergizi gratis (MBG).

Contoh Produk Hukum Kementerian Kesehatan 2025:

- Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, yang mengatur pelayanan kesehatan reproduksi sesuai siklus hidup dan upaya kesehatan seksual.
- Permenkes Nomor 4 Tahun 2025 mengenai perubahan atas Permenkes Nomor 13 Tahun 2024, terkait organisasi dan tata kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi.
- Permenkes Nomor 5 Tahun 2025 mengenai Bantuan Pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit kapal.
- Permenkes Nomor 8 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Permenkes Nomor 25 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang laboratorium kesehatan masyarakat.
- Permenkes Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur tentang Pedoman Nasional Pelayanan Klinis.
- Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 yang diterbitkan untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk dapur pada program makan bergizi gratis.

16. Kementerian Ketenagakerjaan.

Produk hukum ketenaga-kerjaan utama di Indonesia adalah

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penetapannya menjadi UU No. 6 Tahun 2023,

- Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2021 yang mengatur PKWT, PHK, pengupahan, dan jaminan sosial, mencakupi seluruh aspek hubungan kerja mulai dari pra-kerja, selama kerja, hingga pasca-kerja, termasuk hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan.

Peraturan Perundang-undangan Utama

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Dasar utama yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam UU 13/2003 untuk meningkatkan kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: Penetapan dari Perpu Cipta Kerja yang menggantikan UU No. 11 Tahun 2020, mulai berlaku pada 31 Maret 2023.

Undang-Undang Cipta Kerja memiliki beberapa peraturan pelaksanaan yang lebih spesifik, seperti:

- PP Nomor 35 Tahun 2021: Mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja dan istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- PP Nomor 36 Tahun 2021: Mengatur tentang pengupahan, termasuk nilai upah minimum.
- PP Nomor 37 Tahun 2021: Mengatur penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Butir Penting dalam UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja membawa beberapa perubahan signifikan di bidang ketenagakerjaan, antara lain:

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT): Diberikan uang kompensasi bagi pekerja yang habis masa kontraknya, yang sebelumnya tidak diatur.
- Perlindungan Tenaga Kerja: Kewajiban perusahaan untuk memberikan pelatihan dan kompensasi bagi tenaga kerja asing.
- Ketenagakerjaan dan Sistem Kerja: Mengakomodasi sistem kerja baru seperti kerja hybrid dan remote dengan penyesuaian regulasi, termasuk dukungan teknis dan perlindungan data pribadi pekerja.



17. Kementerian Keuangan

Produk hukum terbaru Kementerian Keuangan tahun 2025 meliputi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang

- Efisiensi belanja APBN (PMK 56/2025),
- Standar Biaya Masukan untuk tahun anggaran mendatang (PMK 32/2025), serta
- pengaturan pajak atas aset kripto melalui PMK 50, 53, dan 54 tahun 2025, yang berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Berikut adalah beberapa produk hukum terbaru dari Kementerian Keuangan tahun 2025 yang bisa Anda temukan:

- Peraturan tentang Pajak Kripto
 - PMK Nomor 50, 53, dan 54 Tahun 2025: Mengatur pajak atas transaksi aset kripto yang mulai berlaku 1 Agustus 2025, menetapkan status aset kripto sebagai aset keuangan digital, serta ketentuan pengenaan PPN dan PPh final atas transaksi dan jasa terkait.
- Peraturan tentang Anggaran dan Biaya
 - PMK Nomor 56 Tahun 2025: Mengatur tentang tata cara pelaksanaan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - PMK Nomor 32 Tahun 2025: Menetapkan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Tahun Anggaran 2026, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
 - PMK Nomor 30 Tahun 2025: Mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan.
 - Peraturan Dirjen Pajak (PER-17/PJ/2025): Mengenai penetapan tempat terdaftar bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak besar, khusus, dan madya.
 - Peraturan Dirjen Pajak (PER-11/PJ/2025): Mengatur tentang kewajiban membuat dan melaporkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.



18. Kementerian Komunikasi dan Digital

Produk hukum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025 meliputi berbagai peraturan, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital 2025 .

- Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembangunan Aplikasi SPBE,
- Nomor 9 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas, dan
- Keputusan Menteri Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Perangkat Telekomunikasi Free Space Optics.

19. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Produk hukum Kementerian Kehutanan tahun 2025 meliputi Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) seperti

- Permenhut Nomor 12 Tahun 2025 tentang pungutan hasil hutan dan
- Permenhut Nomor 11 Tahun 2025 tentang pengelolaan tugas belajar PNS, serta
- Surat Edaran (SE) seperti SE Nomor 6 Tahun 2025 terkait kegiatan wisata alam.
- Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri (KM) yang terkait, termasuk PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang ekosistem mangrove dan KM Nomor 62 Tahun 2025 tentang pakaian dinas.

Berikut adalah beberapa contoh produk hukum Kementerian Kehutanan tahun 2025:

Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut)

- Permenhut Nomor 11 Tahun 2025: Mengatur pengelolaan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- Permenhut Nomor 12 Tahun 2025: Mengatur iuran, pungutan hasil usaha, dan pungutan risiko kerusakan lingkungan di sektor kehutanan.

- Permenhut Nomor 8 Tahun 2025: Menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim (sebelumnya Permen LHK No 12 Tahun 2022).
- Permenhut Nomor 16 Tahun 2025: Mengatur tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perbenihan tanaman hutan.

Surat Edaran (SE)

- SE Nomor 6 Tahun 2025: Menjelaskan kegiatan di bidang kehutanan, khususnya terkait pengelolaan wisata alam di kawasan hutan.

20. Kementerian Pekerjaan Umum

Produk hukum Kementerian PUPR tahun 2025 meliputi:

Peraturan Menteri PU No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, Peraturan Menteri PKP No. 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Keputusan Menteri PU No. 672/KPTS/M/2025 tentang Tarif Tol Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Padang, Surat Edaran Menteri PU No. 9/SE/M/2025 tentang Pembayaran Gaji Ketiga Belas, dan Keputusan Menteri PU No. 443/KPTS/M/2025 tentang Dewan Pengawas LSP. Produk hukum ini bisa ditemukan melalui Sistem Informasi dan Jaringan Dokumentasi (SIJDI) Kementerian PUPR, Portal BPK RI atau JDIH Kementerian PUPR JDIH PU.

Contoh Produk Hukum 2025:

- Peraturan Menteri PU No. 1 Tahun 2025 Permen PU No. 1 Tahun 2025 di BPK RI (08 April 2025): Mengatur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian Pekerjaan Umum.
- Peraturan Menteri PKP No. 5 Tahun 2025 Instagram: Menetapkan besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.
- Keputusan Menteri PU No. 672/KPTS/M/2025 Keputusan Menteri nomor 672/KPTS/M/2025 di JDIH PU: Menetapkan golongan jenis kendaraan dan besaran tarif Tol Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Padang.
- Surat Edaran Menteri PU No. 9/SE/M/2025 Surat Edaran Menteri nomor 9/SE/M/2025 di JDIH PU (26 Mei 2025): Mengatur tentang pembayaran gaji ketiga belas di Kementerian Pekerjaan Umum.
- Keputusan Menteri PU No. 443/KPTS/M/2025 Keputusan Menteri nomor 443/KPTS/M/2025 di JDIH PU: Menetapkan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025-2029.

21. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Produk hukum dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 meliputi

- Peraturan Menteri PKP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum,
- Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 mengenai kriteria MBR dan persyaratan rumah, serta

- Peraturan Menteri PKP Nomor 13 Tahun 2025 tentang kriteria penerima dan ekosistem kredit program perumahan.
- Selain itu, ada juga Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/SE/M/2025.

Berikut rincian beberapa produk hukum tersebut:

- Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permenpkp) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum: Ditetapkan pada 17 April 2025, peraturan ini mengatur proses pembentukan dan evaluasi produk hukum di kementerian ini.
- Permenpkp Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): Peraturan ini menetapkan besaran penghasilan dan kriteria MBR serta persyaratan untuk pembangunan dan perolehan rumah, mendukung program rumah subsidi.
- Permenpkp Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perumahan: Mengatur kriteria penerima kredit program perumahan dan ekosistemnya, baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/SE/M/2025: Surat edaran ini berisi petunjuk teknis mengenai pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja eks-Direktorat Jenderal Perumahan.

22. Kementerian Perdagangan.

Produk hukum Kementerian Perdagangan tahun 2025 mencakup berbagai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Keputusan Menteri (Kepmen) yang mengatur kebijakan impor dan ekspor, standarisasi, hingga organisasi internal kementerian. Contohnya meliputi Permendag tentang kebijakan impor barang pertanian, bahan kimia, dan bahan industri tertentu, serta Kepmen tentang harga patokan ekspor produk pertambangan.

Berikut adalah beberapa contoh produk hukum Kementerian Perdagangan tahun 2025:

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag):

- Permendag Nomor 31 Tahun 2025: Mengubah Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang pertanian dan peternakan, termasuk ubi kayu dan turunannya.
- Permendag Nomor 32 Tahun 2025: Mengubah Permendag Nomor 20 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor bahan kimia, bahan berbahaya, dan bahan tambang, dengan fokus pada tata niaga impor etanol.
- Permendag Nomor 15 Tahun 2025: Mengatur standarisasi di bidang perdagangan.
- Permendag Nomor 28 Tahun 2025: Mengatur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Permendag Nomor 16 Tahun 2025: Mengatur kebijakan dan pengaturan impor secara menyeluruh, termasuk prosedur perizinan impor.
- Permendag Nomor 22 Tahun 2025: Mengatur kebijakan dan pengaturan impor barang industri tertentu.

Keputusan Menteri (Kepmen):

- Kepmen Nomor 1693 Tahun 2025: Menetapkan harga patokan ekspor dan harga referensi atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar.
- Kepmen Nomor 1482 Tahun 2025: Menetapkan harga patokan ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar.

23. Kementerian Perhubungan

Produk Hukum Kemenhub Tahun 2025 antara lain

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 7 Januari 2025, mengatur tentang penyelenggaraan angkutan udara, serta mengubah peraturan sebelumnya.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025, mengubah peraturan terkait penyelenggaraan angkutan udara.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025, menggantikan peraturan sebelumnya yang terkait.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 21 Februari 2025, mengatur organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2025 mengatur tentang Kode Simpul Transportasi Nasional.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2025 berlaku sejak 23 Juli 2025 dan mengubah Permenhub Nomor 87 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2025 juga merupakan produk hukum yang diterbitkan pada tahun 2025

24. Kementerian Perindustrian

Produk hukum industri pada tahun 2025 mencakupi

- *Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 13/2025* tentang pelaporan data industri melalui SIINas,
- Permenperin No. 6/2025 yang mencabut SNI Kertas dan Karton Pangan, serta
- Permenperin No. 35/2025 yang memperkuat kebijakan TKDN.
- Selain itu, terdapat pula *Surat Edaran (SE)*, seperti SE No. 1/2025 yang mengubah frekuensi pelaporan kinerja industri menjadi triwulanan.

Berikut adalah beberapa contoh produk hukum industri 2025:

Permenperin

- Permenperin No. 13 Tahun 2025 (Ditjen ILMATE: Mengatur tata cara penyampaian data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- Permenperin No. 6 Tahun 2025 (BPK RI: Mencabut pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib.
- Permenperin No. 35 Tahun 2025 (Instagram: Menggantikan Permenperin No. 16 Tahun 2011 untuk memperkuat kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

- Permenperin No. 22 Tahun 2025 (BPK RI: Mengubah ketentuan mengenai pemberlakuan SNI untuk Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas serta Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin secara wajib.

Surat Edaran (SE)

- SE No. 1 Tahun 2025 (YouTube: Mengubah frekuensi pelaporan kinerja industri dari

25. Kementerian Pertanian

Produk hukum Kementrian Pertanian tahun 2025 antara lain adalah

- Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025: Mengatur mekanisme operasional penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Perpres No. 6 Tahun 2025.
- Permentan Nomor 6 Tahun 2025: Mengubah peraturan sebelumnya mengenai pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, mulai berlaku 21 Maret 2025.
- Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1844 Tahun 2025: Menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan harga referensi untuk produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar.
- Permentan Nomor 19 Tahun 2025: Berisi ketentuan mengenai persyaratan teknis, tata cara pemasukan, dan pengawasan produk hewan dari negara atau zona tertentu.
- Permentan Nomor 21 Tahun 2025: Mengatur tentang pemberian tugas belajar bagi Bantuan Hukum



26. Kementerian Sosial

Produk hukum Kementerian Sosial tahun 2025 meliputi Peraturan Menteri Sosial tentang data tunggal sosial ekonomi, organisasi dan tata kerja Kementerian, dan tunjangan profesi guru sekolah rakyat, serta berbagai Keputusan Menteri mengenai standar layanan ASN, penggunaan pakaian dinas, penerimaan peserta didik baru sekolah rakyat, dan penetapan penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Produk Hukum Utama (Peraturan Menteri Sosial)

- Permensos No. 3 Tahun 2025: Mengatur pemutakhiran dan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program kesejahteraan sosial.
- Permensos No. 2 Tahun 2025: Membahas tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
- Permensos No. 11 Tahun 2025: Mengatur Tunjangan Profesi Guru Sekolah Rakyat.



Contoh Keputusan Menteri Sosial

- Kemensos No. 224/HUK/2025: Standar Layanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Sosial.

- Kemensos No. 214/HUK/2025: Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan September Tahun 2025.
- Kemensos No. 189/HUK/2025: Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat.
- Kemensos No. 196/HUK/2025: Pola Kerja pada Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian Sosial.
- Kemensos No. 50/HUK/2025: Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial.

27. Kementerian Kebudayaan

Produk hukum terkait Kementerian Kebudayaan tahun 2025 mencakupi:

- Peraturan Presiden (Perpres)
 - Perpres 115/2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025-2045: Merupakan peraturan turunan yang memberikan arah dan landasan strategi pemajuan kebudayaan Indonesia hingga 2045, mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran pemajuan kebudayaan.
 - Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025-2045, yang menjadi dasar kebijakan pemajuan kebudayaan, dan
 - Pedoman Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025.
 - Selain itu, terdapat Dana Indonesiana 2025 yang mendukung pelaku budaya melalui Dana Abadi Kebudayaan sesuai UU No. 5 Tahun 2017.
- Pedoman dan Surat Edaran
 - Pedoman Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025: Ditetapkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional ini di seluruh Indonesia guna menciptakan kegiatan yang seragam dan khidmat, serta untuk meneguhkan komitmen pada nilai-nilai Pancasila.
- Program Pendanaan
 - Dana Indonesiana 2025: Dukungan pembiayaan bagi pelaku budaya yang memanfaatkan Dana Abadi Kebudayaan. Program ini mengundang individu dan kelompok budaya untuk menghasilkan karya dan mendukung pengembangan kebudayaan Indonesia, sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

28. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran

Produk hukum Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (KP2MI) tahun 2025 antara lain

- Peraturan Menteri P2MI Nomor 17 Tahun 2025 tentang Biaya Penempatan,
- Perpres Nomor 31 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja, serta
- Peraturan Menteri P2MI Nomor 14 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik
- Surat Edaran Nomor 715 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko P3MI
- Beberapa peraturan lainnya yang diterbitkan oleh BP2MI, seperti
 - Peraturan BP2MI No. 1 Tahun 2025 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia
 - Peraturan Menteri P2MI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan PMI.

Berikut adalah beberapa contoh produk hukum Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (KP2MI) dan BP2MI tahun 2025:

- Peraturan Menteri P2MI Nomor 17 Tahun 2025 tentang Biaya Penempatan PMI, yang mengatur tentang komponen biaya penempatan, pembebanan biaya, dan pengecualiannya.
- Perpres Nomor 31 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BP2MI.
- Peraturan Menteri P2MI Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.
- Surat Edaran (SE) Nomor 715 Tahun 2025 tentang pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko bagi penanggung jawab dan kepala cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
- Peraturan BP2MI No. 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang tata cara permohonan izin perusahaan penempatan, penggunaan deposito, dan pelaporan.
- Peraturan Menteri P2MI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

29. Kementerian Haji dan Umrah

Produk hukum utama Kementerian Haji dan Umroh di tahun 2025 adalah

- Undang-Undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang baru, yang disahkan DPR pada 26 Agustus 2025, yang mengubah Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 7 Tahun 2025 tentang tata cara pengeluaran keuangan haji dan Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M.

Produk Hukum Utama:

- Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah: Produk hukum ini disahkan DPR pada 26 Agustus 2025 dan mengubah struktur organisasi, menjadikan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai Kementerian Haji dan Umrah. UU ini mulai berlaku pada tahun 2026 dan membawa beberapa ketentuan baru, seperti usia minimal jemaah yang turun menjadi 13 tahun.

Produk Hukum Terkait Lainnya:

- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 7 Tahun 2025: Peraturan ini merupakan perubahan atas PMA Nomor 9 Tahun 2020, yang mengatur tata cara pengeluaran keuangan untuk penyelenggaraan ibadah haji.
- Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPIH 1446 H/2025 M: Keppres ini diterbitkan untuk menetapkan Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, yang berasal dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat.

Perubahan Konteks Menjelang 2025:

- Penyelenggaraan haji tahun 2025 masih berada di bawah wewenang Kementerian Agama.

- Perubahan ke Kementerian Haji dan Umrah baru akan berlaku penuh mulai tahun 2026.

30. Kementerian Koperasi

Adalah baik bila Kabinet mengundang koperasi LN nan-sukses untuk benchmarking. Produk hukum Kementerian Koperasi tahun 2025 mencakup berbagai peraturan, terutama yang berkaitan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, seperti Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang penyaluran dana bergulir kepada koperasi percontohan, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang pengembangan usaha koperasi merah putih, dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang pelaksanaan program dan urusan pemerintahan. Selain itu, ada juga Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mengamanatkan percepatan pembentukan 80.000 unit Koperasi Merah Putih.

Peraturan Menteri Koperasi:

- Permenkop No. 1 Tahun 2025 (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT) tentang penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock Up).
- Permenkop No. 2 Tahun 2025 (PERATURAN.GO.ID) tentang pengembangan usaha Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
- Permenkop No. 3 Tahun 2025 (BPK RI) tentang pelaksanaan program, termasuk penyelenggaraan dekonsentrasi, pembinaan, dan pengawasan.



Instruksi Presiden:

- Inpres No. 9 Tahun 2025 (BPK RI) tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mengoptimalkan 80.000 unit koperasi.

Lain-lain:

- Surat Edaran Menteri Koperasi No. 1 Tahun 2025 (tppp3mdkabngada.id) tentang tata cara pembentukan Kopdes MP.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 (JDIH Kementerian Keuangan) mengenai tata cara pinjaman untuk pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

31. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Produk hukum Kementerian UMKM tahun 2025 mencakup berbagai peraturan dan surat edaran, antara lain

- Peraturan Menteri UMKM Nomor 2 Tahun 2025 tentang penggunaan DAK nonfisik untuk UMKM, serta Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas. Terdapat juga beberapa Surat Edaran seperti SE Nomor 15 Tahun 2025 tentang

partisipasi pegawai, SE Nomor 14 Tahun 2025 tentang cuti bersama, dan SE Nomor 6 Tahun 2025 tentang perekrutan pegawai non-ASN.

32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Produk hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2025 meliputi

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK), Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengintegrasian kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan daerah, serta Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang implementasi aplikasi Simfoni PPA. Selain itu, ada juga Perpres Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring yang perencanaannya melibatkan Kemen PPPA.

Produk Hukum untuk kebutuhan Internal Kemen PPPA Tahun 2025

- Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025: Mengatur Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencabut peraturan sebelumnya.
- Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2025: Berisi panduan untuk mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di daerah, seperti RPJMD dan RKPD.
- Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2025: Menegaskan implementasi pencatatan aduan kekerasan melalui aplikasi Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Versi 3 dengan Modul Pengelolaan Tiket Pengaduan.

Peraturan Presiden Terkait Tahun 2025

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah dalam Jaringan Tahun 2025-2029: Dokumen perencanaan yang memuat panduan pelaksanaan perlindungan anak dari penyalahgunaan teknologi informasi

33. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Produk hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) tahun 2025 meliputi Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2025 tentang organisasi kementerian, Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang tugas kedinasan ASN secara fleksibel, dan Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2025 terkait perubahan Permen tentang jabatan fungsional pengawas produk halal.

Berikut adalah rincian beberapa produk hukum dari Kementerian PANRB tahun 2025:

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 1 Tahun 2025: Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi serta susunan organisasi kementerian.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 4 Tahun 2025: Peraturan ini menetapkan mengenai pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 7 Tahun 2025: Peraturan ini merupakan perubahan atas Permen Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Produk Halal, seperti yang dikutip di situs BPK RI.

34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Produk hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas) tahun 2025 meliputi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Peraturan Menteri (Permen) PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional, dan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN).

Berikut rincian produk hukum tersebut:

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029: Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih, serta menjadi dasar penyusunan rencana kerja kementerian dan lembaga, serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional (PSN): Permen ini mengatur bagaimana proyek proyek strategis nasional akan direncanakan dan dikendalikan dalam kerangka pelaksanaan RPJMN 2025-2029.
- Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN): Permen ini menjadi pedoman dalam berbagi dan menggunakan data DTSN untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional, serta menjaga privasi data penduduk.



35. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Produk hukum utama Kementerian BUMN tahun 2025 adalah sbb

- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang disahkan Februari 2025, dan yang terbaru adalah
- Perubahan keempat UU BUMN yang disahkan DPR pada 2 Oktober 2025.

Perubahan keempat ini melakukan transformasi dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengelola Investasi (BP BUMN) dan menetapkan aturan baru terkait larangan rangkap jabatan menteri di BUMN, serta pengaturan lainnya seperti pengalihan pegawai dan perpajakan.

Butir-butir penting dari perubahan keempat UU BUMN

- Transformasi Kelembagaan: Kementerian BUMN diubah menjadi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP BUMN).

- Larangan Rangkap Jabatan: Dilarang bagi Menteri dan Wakil Menteri untuk menjabat di direksi, komisaris, atau dewan pengawas BUMN.
- Pengalihan Kewenangan: Fungsi pengawasan dan pengelolaan BUMN dipindahkan dari kementerian ke badan khusus yang baru dibentuk.
- Perlindungan Direksi dan Komisaris: Memperjelas doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) untuk melindungi direksi dan komisaris yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik.
- Pengalihan Pegawai: Pegawai negeri sipil (ASN) di Kementerian BUMN akan dialihkan ke BP BUMN sesuai dengan peraturan pelaksana.
- Pengaturan Perpajakan: Terdapat pengaturan khusus untuk pajak atas transaksi yang melibatkan BUMN.



36. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Produk hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2025 mencakupi berbagai peraturan seperti

- Permenpora No. 1 Tahun 2025: Mengatur organisasi dan tata kerja Kemenpora, menggantikan peraturan sebelumnya (Permenpora No. 8 Tahun 2022).
- Permenpora No. 2 Tahun 2025: Tentang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
- Permenpora No. 3 Tahun 2025: Tentang kualifikasi dan kompetensi pelatih olahraga internasional.
- Permenpora No. 4 Tahun 2025: Tentang logo Kemenpora dan penggunaannya.
- Permenpora No. 5 Tahun 2025: Tentang penyelenggaraan dekonsentrasi bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada gubernur.
- Permenpora No. 7 Tahun 2025: Mencabut Permenpora No. 14 Tahun 2024 tentang standar pengelolaan organisasi olahraga prestasi.

Keputusan Menteri (Kepmen)

- Kepmen Nomor 34 Tahun 2025: Mengatur uraian fungsi susunan organisasi di lingkungan Kemenpora.
- Kepmen Nomor 12 Tahun 2025: Ditetapkan pada Februari 2025 mengenai sistem kerja di lingkungan Kemenpora.
- Kepmen Nomor 46 Tahun 2025: Tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di

37. Kementerian Lingkungan Hidup.

Produk hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tahun 2025 mencakup berbagai peraturan menteri, seperti Permen LH/BPLH No. 5/2025 tentang Program Adiwiyata dan Permen LH/BPLH No. 7/2025 tentang PROPER, yang merevitalisasi peraturan sebelumnya pasca pemisahan lembaga. Selain itu, terdapat juga Permen LH/BPLH No. 14/2025 tentang Status dan

Kondisi Lingkungan Hidup dan No. 17/2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Contoh Produk Hukum 2025:

- Permen LH/BPLH No. 5 Tahun 2025: Mengatur tentang penyelenggaraan Program Adiwiyata, sebuah program penilaian dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah.
- Permen LH/BPLH No. 7 Tahun 2025: Mengatur tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti yang diumumkan melalui situs Proper.
- Permen LH/BPLH No. 14 Tahun 2025: Berisi mengenai status dan kondisi lingkungan hidup serta respon terhadap perubahan lingkungan.
- Permen LH/BPLH No. 17 Tahun 2025: Ditetapkan pada 29 September 2025 dan mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

38. Kementerian Pariwisata.

Produk hukum Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tahun 2025 mencakup beberapa peraturan menteri, seperti

- Permenpar No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja,
- Permenpar No. 3 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik,
- Permenpar No. 4 Tahun 2025, dan
- Permenpar No. 5 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) 2025

- Permenpar No. 1 Tahun 2025: Mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata, menggantikan peraturan sebelumnya dari tahun 2021.
- Permenpar No. 3 Tahun 2025: Mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan menggantikan peraturan dari tahun 2020.
- Permenpar No. 5 Tahun 2025: Ditetapkan pada 8 September 2025, mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Kerja Sama dan Peraturan Lain

- Nota Kesepahaman dengan KemenPPPA: Ditandatangani pada 21 April 2025 untuk kerja sama di berbagai bidang.
- RUU Kepariwisata: Pemerintah dan DPR menyepakati untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ke tingkat II.

39. Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Produk hukum Kementerian Investasi tahun 2025 mencakupi

- Peraturan Menteri Investasi (Permen) Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2025 yang terkait dengan tata kelola data, tata naskah dinas, dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi landasan utama untuk reformasi sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Online (OSS) dan PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang pembentukan Badan Pelaksana.



Peraturan Menteri Investasi 2025

- Permen No. 3/2025: Mengatur pedoman tentang tata kelola data di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- Permen No. 4/2025: Menetapkan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, berlaku efektif mulai 1 Januari 2026.
- Permen No. 5/2025: Memberikan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah 2025

- PP No. 28/2025: Memberlakukan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan pasti.
- PP No. 10/2025: Memungkinkan presiden untuk menunjuk menteri yang menyelenggarakan urusan investasi sebagai Kepala Badan Pelaksana, serta mengatur sumber daya manusia pada Badan tersebut, mulai berlaku 24 Februari 2025.

40. Kementerian Ekonomi Kreatif

Produk hukum Kementerian Ekonomi Kreatif tahun 2025 meliputi beberapa

Peraturan Menteri (Permen) seperti Permenpar No. 1 Tahun 2025 tentang standar pelayanan dan Permen No. 6 Tahun 2025 tentang hal-hal lainnya, serta Permen No. 3 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Selain itu, terdapat Peraturan Daerah yang relevan seperti Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2025 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Produk hukum tingkat kementerian

- Permenpar No. 1 Tahun 2025: Mengenai standar pelayanan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Permen No. 6 Tahun 2025: Berbagai peraturan menteri ekonomi kreatif lainnya.
- Permen No. 3 Tahun 2025: Mengatur organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan kementerian.

41. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Menteri dan BKKBN

- Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 1 Tahun 2025: Mengatur pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
- Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 2 Tahun 2025: Mengatur tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan

(KBPP), termasuk tata kelola program, sistem informasi, sumber daya manusia, pendanaan, dan alat kontrasepsi.

- Keputusan Deputy II Nomor 9 Tahun 2025: Menetapkan Kategori Produk Katalog Elektronik Sektorial pada BKKBN.
- Keputusan Kepala BKKBN Nomor 51 Tahun 2025: Menetapkan pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial pada BKKBN.

Produk hukum lainnya

- Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025-2045: Diluncurkan pada Juli 2025, ini adalah peta jalan pembangunan kependudukan 5 tahunan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
- Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2025: Diterbitkan bersama kementerian terkait mengenai pembentukan dan penyelenggaraan tempat penitipan anak di lingkungan instansi pemerintah dan swasta.
- Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 7 Tahun 2025: Menyediakan panduan lebih lanjut terkait isu-isu kependudukan.



42. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Produk hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik (Kemenko Polhukam) tahun 2025 meliputi

- Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Permenko No. 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum, serta beberapa
- Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) seperti Kepmenko No. 53 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia dan
- Kepmenko No. 15 Tahun 2025 tentang Logo Kemenko Polhukam
- Permenko Polhukam No. 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum dan Permenko Kumham Imipis No. 1 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian.
- Beberapa produk hukum lainnya dikeluarkan oleh kementerian koordinator lain yang berfokus pada bidang hukum, seperti
 - Permenko PMK No. 2 Tahun 2025 tentang koordinasi kadar nikotin dan tar, dan
 - Permenko Kumham Imipis No. 3 Tahun 2025 mengenai tunjangan kinerja.
- Produk Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayarakatan (Kumham Imipas) .



- Permenko Kumham Imipas No. 1 Tahun 2025: Tentang Klasifikasi Arsip Kementerian.
- Permenko Kumham Imipas No. 2 Tahun 2025: Tentang Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam elektronik menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi Naskah Dinas Secara Elektronik.
- Permenko Kumham Imipas No. 3 Tahun 2025: Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Produk Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polhukam)

- Permenko Polhukam No. 2 Tahun 2025: Tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum.

Contoh produk hukum dari kementerian koordinator lainnya yang relevan

- Permenko PMK No. 1 Tahun 2025: Mencabut Permenko PMK No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- Permenko PMK No. 2 Tahun 2025: Mengatur tentang Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar.

43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beberapa produk hukum penting tahun 2025:

- Permenko No. 1 Tahun 2025: Mencabut Permenko Nomor 13 Tahun 2022 tentang Mekanisme Kerja di Kemenko Perekonomian.
- Permenko No. 2 Tahun 2025: Mengubah beberapa ketentuan dalam Permenko Nomor 7 Tahun 2021.
- Permenko No. 3 Tahun 2025: Mengubah Permenko Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di Kemenko Perekonomian.
- Permenko No. 4 Tahun 2025: Pedoman pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya, yang pendanaannya bersumber dari Lembaga Keuangan atau Koperasi Penyalur.
- Permenko No. 6 Tahun 2025: Mengubah beberapa ketentuan dalam Permenko Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian.
- Permenko No. 7 Tahun 2025: Pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Permenko No. 12 Tahun 2025: Mengubah ketentuan dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Permenko No. 13 Tahun 2025: Pedoman pelaksanaan Kredit Program Perumahan.
- Permenko No. 14 Tahun 2025: Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Permenko No. 15 Tahun 2025: Organisasi dan tata kerja Komite, Unit Kerja Pendukung, dan Sekretariat Kelapa Sawit Berkelanjutan.

44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Produk hukum Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tahun 2025 mencakupi

- Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 1 Tahun 2025 tentang pencabutan peraturan lama terkait Dewan Jaminan Sosial Nasional dan
- Permenko Nomor 2 Tahun 2025 tentang koordinasi penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar, serta mendorong implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital.
- Selain itu, Kemenko PMK juga menginisiasi Surat Edaran Bersama (SEB) tentang perlindungan anak dan mendorong penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) GN-ANAK untuk memperkuat perlindungan anak

45. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Produk hukum Kemenko Infrastruktur 2025 antara lain meliputi

- Permenko Infra No. 1/2025: Mengatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan kementerian.
- Permenko Infra No. 2/2025: Menetapkan Standar Layanan Informasi Publik.
- Permenko Infra No. 3/2025: Mengatur Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- Permenko Infra No. 4/2025: Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja.
- Permenko Infra No. 5/2025: Berisi Piagam Pengawasan Intern di Kemenko Infrastruktur.

Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko Infra)

- Kepmenko Infra No. 37/2025: Tentang Klasifikasi Arsip.

Menteri Koordinator Bidang *Infrastruktur* dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat sistem transportasi nasional yang lebih efisien dan terintegrasi yang dimana hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

46. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Beberapa produk hukum penting dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) pada tahun 2025 meliputi:

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 yang menjadi alat nyata pemberdayaan masyarakat, meskipun detail spesifiknya memerlukan penelusuran lebih lanjut.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2025 tentang fokus prioritas penggunaan Dana Desa 2025, yang mewajibkan pemerintah desa mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Kemenko PM juga terlibat dalam koordinasi penerbitan produk hukum dari kementerian di bawahnya, seperti Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur persetujuan kepala desa terhadap pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih

47. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Produk hukum terkait bidang pangan pada tahun 2025 mencakup instruksi presiden, peraturan menteri, dan peraturan badan pangan nasional, seperti Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan irigasi, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 terkait tata kelola pupuk bersubsidi, dan beberapa peraturan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengenai petunjuk teknis DAK nonfisik, tata kelola pupuk bersubsidi, dan pengelolaan sistem distribusi pangan.



Instruksi Presiden (Inpres)

- Inpres Nomor 2 Tahun 2025: Tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
- Inpres Nomor 14 Tahun 2025: Tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air.

Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2025: Petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2025.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025: Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (PMK) Nomor 12 Tahun 2025: Perubahan keempat atas PMK Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat.